ABSTRAK

Linton Naibaho, NIM 3212411021, Penerapan Prinsip Kepatuhan terhadap pasal 71 dan 73 Undang-undang Nomor Tahun 2016 Dalam penyaluran Bansos selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Dairi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepatuhan terhadap Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Kabupaten Dairi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan pasangan calon (paslon) terhadap Pasal 71 dan 73 serta mekanisme pengaturan pelarangan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan praktik politisasi bansos yang bertentangan dengan Pasal 71 dan 73 UU No. 10 Tahun 2016. Pengawasan yang dilakukan Bawaslu relatif baik secara kelembagaan, namun dalam praktiknya menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, bukti, dan partisipasi masyarakat. Hal ini membuat penerapan prinsip kepatuhan belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, transparansi dalam distribusi bansos, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan bansos pada masa Pilkada.

Kata Kunci: *Kepatuhan, Pasal 71 dan 73, Penyaluran Bansos, Pilkada, Kabupaten Dairi, Bawaslu, KPU, Pengawasan.*

THE Character Building UNIVERSITY

ABSTRACK

Linton Naibaho, NIM 3212411021, ***Application of Compliance Principles to Articles 71 and 73 of Law Number 2016 in the Distribution of Social Assistance during the 2024 Regional Head Election in Dairi Regency. Department of Pancasila and Citizenship Education. Faculty of Social Sciences. State University of Medan.***

This study aims to analyze the application of the principle of compliance with Article 71 and Article 73 of Law Number 10 of 2016 in the distribution of social assistance (bansos) during the implementation of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Dairi Regency. The research method used is qualitative with an empirical juridical approach. The main focus of this study is to analyze the compliance of candidate pairs (paslon) with Articles 71 and 73 as well as the regulatory mechanisms for prohibiting the distribution of social assistance carried out by Bawaslu and KPU. The results of the study indicate that there are still practices of politicization of social assistance that are contrary to Articles 71 and 73 of Law Number 10 of 2016. Supervision carried out by Bawaslu is relatively good institutionally, but in practice it faces obstacles due to limited resources, evidence, and community participation. This makes the implementation of the principle of compliance less than optimal. This study concludes the need to strengthen the oversight mechanism, transparency in the distribution of social assistance, and increase awareness. Community law to prevent misuse of social assistance during the regional elections.

Keywords: Compliance, Articles 71 and 73, Distribution of Social Assistance, Dairi Regency Election, Bawaslu, KPU, Supervision.

THE Character Building UNIVERSITY